

**STUDI RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK
(RDKK) PUPUK BERSUBSIDI DI DESA GANESHA MUKTI
(STUDI KASUS DESA GANESHA MUKTI KECAMATAN
MUARA SUGIHAN KABUPATEN BANYUASIN)**

**Oleh
EKA EVITARIA**



**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG
2019**

**STUDI RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK
(RDKK) PUPUK BERSUBSIDI DI DESA GANESHA MUKTI
(STUDI KASUS DESA GANESHA MUKTI KECAMATAN
MUARA SUGIHAN KABUPATEN BANYUASIN)**

**STUDI RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK
(RDKK) PUPUK BERSUBSIDI DI DESA GANESHA MUKTI
(STUDI KASUS DESA GANESHA MUKTI KECAMATAN
MUARA SUGIHAN KABUPATEN BANYUASIN)**

**Oleh
EKA EVITARIA
412013037**

SKRIPSI

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Pertanian**

**pada
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

**STUDI RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK (RDKK)
PUPUK BERSUBSIDI DI DESA GANESHA MUKTI (STUDI KASUS
DESA GANESHA MUKTI KECAMATAN MUARA SUGIHAN
KABUPATEN BANYUASIN)**

Oleh
EKA EVITARIA

412013037

telah dipertahankan pada ujian 30 Agustus 2019

Pembimbing Utama,



Harniatun Iswarini, SP, M.Si

Pembimbing Pendamping,



Sisvaberti Afrivatna, SP, M.Si

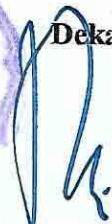
Palembang, 10 September 2019

Universitas Muhammadiyah Palembang

Fakultas Pertanian



Dekan,



Dr. Ir. Gusmiatun, M.P

NIDN/NBM: 0016086901/727236

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EKA EVITARIA

Nim : 412013037

Tempat/ tanggal lahir: Ganesha Mukti / 13 September 1995

Pogram studi : Agribisnis

Menyatakan bahwa

1. Karya ilmiah ini adalah asli hasil tulisan yang disusun dan bukan merupakan hasil dari plagiarisme. Apabila dikemudian hari diketahui adanya ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.
2. Memberikan hak kepada perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, alih media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikan di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.
3. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Palembang, 23 Agustus 2019

Yang membuat pernyataan,



RINGKASAN

EKA EVITARIA, “Studi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi di Desa Ganesha Mukti (Studi Kasus Desa Ganesha Mukti Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin)”. (Dibimbing oleh **HARNIATUN ISWARINI** dan **SISVABERTI AFRIYATNA**).

Penelitian ini bertujuan Untuk mempelajari kegiatan pelaksanaan penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi pada kelompok tani di desa Ganesha Mukti, dan Untuk mempelajari kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi pada kelompok tani di desa Ganesha Mukti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penarikan contoh melalui *Non-probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dan dokumentasi. Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan cara *reduksi data*, *data display*, dan *conclusion drawing*. Dari hasil penelitian tersebut menghasilkan Kegiatan pelaksanaan penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi pada kelompok tani di desa Ganesha Mukti yaitu: (1) Musyawarah Anggota-Anggota Kelompok Tani tentang Rencana kebutuhan Pupuk Petani; (2) Pertemuan Pengurus Kelompok Tani dalam rangka Perumusan RDKK; (3) Pertemuan Kelompok Tani di tingkat Gapoktan untuk Penyusunan Draft RDKK; (4) Perbanyakan dan Pengiriman RDKK Desa/GAPOKTAN; dan (5) Rekapitulasi RDKK dan Penyusunan Kebutuhan Pupuk Tingkat Desa/GAPOKTAN. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi pada kelompok tani di desa Ganesha Mukti yaitu: (1) nama tidak sesuai dengan KTP; (2) nama pemilik lahan dan sertifikat bukan nama penggarap lahan; (3) sawah petani terletak di desa Ganesha Mukti namun rumah berdasarkan alamat di KTP yang menggarap berasal dari desa lain, dan (4) terdapat nama ganda dalam pengajuan draft RDKK, (5) masalah ketidakhadiran anggota Poktan dalam pertemuan anggota untuk membahas kebutuhan petani anggota Poktan akan pupuk untuk lahan pertaniannya, dan (6) ada kelompok tani yang menganggap menyusun RDKK hanya sekedar formalitas, bahkan RDKK disusun oleh penyuluh pertanian.

SUMMARY

EKA EVITARIA, "Study of Definitive Plans for Group Needs (RDKK) Subsidized Fertilizer in Ganesha Mukti Village (Case Study of Ganesha Mukti Village, Muara Sugihan District, Banyuasin Regency)". (Supervised by **HARNIATUN ISWARINI** and **SISVABERTI AFRIYATNA**).

This study aimed to study the implementation of the preparation of a Definitive Plans for Group Needs (RDKK) for subsidized fertilizers in farmer groups in the village of Ganesha Mukti, and to study the constraints faced in the preparation of the Definitive Plans for Group Needs (RDKK) Subsidized Fertilizer for farmers in the Ganesha Mukti village. This research was conducted by using qualitative approach. The sampling method used was Non-probability sampling with purposive sampling technique. Data collection was done by interview, and documentation. Data processing and analysis was carried out by means of data reduction, data display and drawing conclusions. From the results of this research in the implementation of the preparation of the Definitive Plans for Group Needs (RDKK) for subsidized fertilizers in farmer groups in the village of Ganesha Mukti consisting of: (1) Deliberation of Farmer Group Members on Plans for Farmer Fertilizer needs; (2) Farmers Group Management Meeting in the context of RDKK Formulation; (3) Farmers Group Meeting at the Gapoktan level for the Drafting of the RDKK; (4) Propagation and Delivery of Village RDKK / GAPOKTAN; and (5) RDKK Recapitulation and Village / GAPOKTAN Fertilizer Compilation Needs. Obstacles encountered in the implementation of the preparation of the Definitive Plans for Group Needs (RDKK) for subsidized fertilizer in farmer groups in the village of Ganesha Mukti, namely: (1) the name used is different from ID card; (2) the name of the land owner and the certificate is not the name of the tiller; (3) the farmer's rice field is located in the village of Ganesha Mukti but the house is based on the address on the ID card that works from another village, and (4) there is a double name in the RDKK draft submission, (5) the problem of absence of Poktan members in member meetings to discuss the needs of member farmers Poktan will be fertilizer for agricultural land, and (6) there are farmer groups that consider drawing up RDKK as mere formality, and even RDKK is composed by agricultural extension workers.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkah dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Studi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi di Desa Ganesha Mukti (Studi Kasus Desa Ganesha Mukti Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin)”**, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Harniatun Iswarini, SP, M.Si dan Sisvaberti Afriyatna, SP, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan petunjuk, bimbingan dan pengarahan yang menunjang dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman dan semua pihak yang telah membantu memberikan saran dan kritik dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, untuk itu saran dan kritik sangat penulis harapkan dalam kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran bagi kita semua. Amin.

Palembang, Agustus 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
BAB II. KERANGKA TEORITIS	10
A. Penelitian Terdahulu yang Sejenis	10
B. Tinjauan Pustaka	15
1. Kelompok Tani.....	15
2. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK)	18
3. Pelaksanaan Penyusunan RDKK.....	20
4. Pembiayaan	27
5. Pelaporan.....	27
6. Pupuk Bersubsidi.....	27
C. Model Pendekatan	30
D. Batasan Penelitian dan Operasionalisasi Variabel	32
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	33
A. Tempat dan Waktu	33
B. Metode Penelitian.....	33
C. Metode Penarikan Contoh.....	33
D. Metode Pengumpulan Data	35
E. Metode Pengolahan dan Analisis Data.....	35
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	37
A. Keadaan Umum Daerah Penelitian	37
B. Identitas Responden Penelitian	42
C. Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi pada Kelompok Tani di Desa Ganesha Mukti	47
D. Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi pada Kelompok Tani di Desa Ganesha Mukti	52

E. Pembahasan.....	54
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang sangat besar, sehingga masalah ketahanan pangan nasional merupakan isu sentral dalam pembangunan serta merupakan fokus yang harus diutamakan dalam pembangunan pertanian. Permintaan akan pangan yang merupakan kebutuhan mendasar akan terus meningkat seiring dengan perkembangan jumlah penduduk, oleh karena itu diperlukan strategi dalam perencanaan pencapaian ketahanan pangan nasional dengan didasarkan pada pertumbuhan penduduk dan peningkatan produksi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Ketergantungan pangan pokok masyarakat pada beras mengharuskan Pemerintah untuk tetap memprioritaskan peningkatan produksi padi dengan berbagai upaya. Dengan mengandalkan lahan sawah yang ada saat ini, maka selain penggunaan varietas unggul, penggunaan pupuk yang tepat menjadi salah satu faktor utama untuk mendorong peningkatan produksi pertanian (Irianto, 2016). Untuk mendukung program ini, bidang penyuluhan pertanian menjadi ujung tombak pemerintah.

Efektivitas penggunaan pupuk diarahkan pada penerapan pemupukan berimbang dan organik sesuai rekomendasi spesifik lokasi atau standar teknis penggunaan pupuk yang dianjurkan. Dalam penerapan pemupukan berimbang, perlu didukung dengan aksesibilitas dalam memperoleh pupuk dengan harga yang terjangkau (Irianto, 2016).

Kebijakan pupuk bersubsidi di Indonesia sudah mulai diterapkan sejak tahun 1970 an. Pemberian subsidi pupuk oleh pemerintah kepada petani bertujuan untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian melalui teknologi pemupukan. Selain itu, kebijakan pupuk bersubsidi juga sebagai upaya peningkatan komoditas pertanian untuk ketahanan pangan yang berkelanjutan. Agar kebijakan pupuk bersubsidi dapat diterima oleh petani secara 6 (enam) tepat yakni tepat jenis,

jumlah, harga, mutu, waktu dan tempat, maka pemerintah perlu mengatur mekanisme penyaluran dan pendistribusian (Ningsih, 2017).

Pemerintah memfasilitasi penyediaan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian guna menjamin ketersediaan pupuk dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan, sehingga petani dapat menerapkan pemupukan berimbang guna mewujudkan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pertanian sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas dan kehidupan petani yang lebih baik (Irianto, 2016).

Kebijakan subsidi pupuk di Indonesia secara historis mengalami beberapa kali perubahan. Pada periode 1970-1993, sistem subsidi yang diberlakukan adalah subsidi harga dengan sumber pembiayaan berasal dari APBN. Pada periode ini, pupuk yang disubsidi adalah harga pupuk yang berasal dari impor dan pupuk produksi dalam negeri. Periode 1999-2001, dikarenakan pada tahun 1998 terjadi krisis ekonomi, maka subsidi harga pupuk dicabut dan sistem subsidi harga diganti menjadi subsidi harga bahan baku untuk pembuatan pupuk yakni subsidi gas. Pada Periode 2003-2005, sistem subsidi yang berlaku merupakan kombinasi subsidi gas dan subsidi harga. Pemberian subsidi gas diperuntukkan bagi pupuk Urea, sementara subsidi harga untuk pupuk non urea. Sedangkan pada periode 2006 hingga saat ini, subsidi yang berlaku adalah subsidi harga, yang dihitung dengan formula, selisih antara HET dengan Harga Pokok Penjualan (HPP) dan biaya produksi dikalikan volume produksi yang merupakan angka subsidi yang ditanggung oleh pemerintah dengan sumber subsidi berasal dari APBN (Ningsih, 2017).

Pada tahun 2017, sesuai Undang Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, telah diamanatkan program pengelolaan subsidi pupuk. Sebagai tindaklanjut terhadap kebijakan tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian

Nomor 69/Permentan/SR.310/12/2016 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2017 (Undang Undang Nomor 18, 2016). Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada Tabel 1 dan 2.

Tabel 1. Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Tahun 2017

Jenis Pupuk	2016 (Rp/kg)	2017 (Rp/kg)	Kemasan (kg)
Urea	1.800	1.800	50
SP 36	2.000	2.000	50
ZA	1.400	1.400	50
NPK	2.300	2.300	50
Organik	500	500	40

Sumber: Kementerian Pertanian, 2016

Berdasarkan Tabel 1, diketahui bahwa harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi masih tetap dan tidak mengalami kenaikan sama sekali.

Tabel 2. Alokasi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017

Jenis Pupuk	2016 (Ton)	2017 (Ton)	Perubahan (Ton)
Urea	173.600	139.860	-33.740
SP 36	43.600	40.565	-3.035
ZA	7.890	5.879	-2.011
NPK	112.290	87.400	-24.890
Organik	23.610	15.280	-8.330

Sumber: Kementerian Pertanian, 2016

Berdasarkan Tabel 2, jika dibandingkan kuota tahun 2016 lalu, kuota pupuk bersubsidi di Sumatera Selatan Urea 2017 turun sebanyak 33.740 Ton, SP-36 turun 3.035 Ton, ZA turun sebanyak 2.011 Ton, NPK turun sebanyak 24.890 Ton, pupuk organik turun sebanyak 8.330 Ton.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi, maka kebutuhan pupuk harus berdasarkan kebutuhan riil petani, pekebun, peternak dan petambak yang disusun secara berkelompok dalam bentuk Rencana Definitif Kebutuhan kelompok (RDKK).

RDKK merupakan alat perumusan untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi dan alat mesin pertanian, baik yang berdasarkan kredit/permodalan usahatani bagi anggota poktan yang memerlukan maupun dari swadana petani. Penyusunan RDK/RDKK merupakan kegiatan strategis yang harus dilaksanakan secara serentak dan tepat waktu, sehingga diperlukan suatu gerakan untuk mendorong poktan menyusun RDK/RDKK dengan benar dan sesuai dengan kebutuhan petani. Mengingat kemampuan petani dalam penyusunan RDK/RDKK masih terbatas, maka penyuluh pertanian perlu mendampingi dan membimbing poktan (Irianto, 2014).

Penyusunan RDK/RDKK diatur dalam Permentan No. 273 Tahun 2007. Tujuan penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi adalah membantu petani, pekebun, peternak dan petambak untuk merencanakan usulan pengadaan pupuk dengan penyediaan pupuk bersubsidi sesuai azas 6 (enam) tepat (tepat jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu dan harga). Penyusunan RDKK dilakukan secara serentak dan tepat waktu, dibimbing oleh Penyuluh, Petugas teknis, Kepala Cabang Dinas (KCD) /Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (KUPTD) dan didukung oleh Kepala Desa/Lurah setempat (Permentan No. 273, 2007).

Dengan adanya kegiatan ini, pemerintah melalui Kementerian Pertanian mengharapkan terpenuhinya kebutuhan petani berupa benih, pupuk, pestisida, alsintan dalam rangka keberlangsungan usahatannya serta terwujudnya iklim yang kondusif bagi penyediaan pupuk di Indonesia, sehingga petani mudah dalam

mendapatkan pupuk sesuai dengan kebutuhannya, khususnya pupuk bersubsidi. Kecamatan Muara Sugihan merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian pada sektor pertanian. Harga pupuk bersubsidi tingkat pengecer di Kecamatan Muara Sugihan Tahun 2015-2016 dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Harga Pupuk Bersubsidi Tingkat Pengecer Di Kecamatan Muara Sugihan Tahun 2015-2016

Jenis Pupuk	HET (Rp/kg)	2015 (Rp/kg)	2016 (Rp/kg)
Urea	1.800	1.750	1.750
SP 36	2.000	2.100	2.100
ZA	1.400	1.500	1.500
NPK	2.300	2.400	2.500
Organik	500	600	600

Sumber: Observasi dan Wawancara, tanggal 15 Maret 2017

Berdasarkan Tabel 3, dari hasil wawancara terhadap petani di desa Ganesha Mukti, salah satu desa di Kecamatan Muara Sugihan, juga diketahui bahwa masalah yang dihadapi petani adalah ketidakmampuan petani dalam membeli pupuk yang dirasakan sangat mahal, selain itu penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan, masih ditemukan berbagai permasalahan, baik dalam penjualan oleh para pengecer yang dirasakan kurang begitu terjangkau oleh para petani, masih banyak petani yang mengeluhkan harga pupuk ditingkat pengecer tidak sesuai HET yang berlaku. Kenaikan harga ini akan merugikan petani karena harga pupuk bersubsidi di pasar lebih tinggi dari HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu hal yang menjadi alasan bagi pengecer menaikkan harga secara tidak resmi adalah untuk mendapatkan margin pemasaran dari pengecer dan menutupi biaya pemasaran karena harga pupuk bersubsidi yang kurang realistis. Kenaikan harga ini akan merugikan petani karena harga pupuk bersubsidi di pasar lebih tinggi dari HET yang ditetapkan oleh pemerintah.

Permasalahan lain yang dihadapi petani adalah kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi karena tidak tersedia di tempat/toko penyalur resmi dan masih seringnya terjadi isu langka pasokan dan lonjakan harga pupuk ditingkat petani.

Pada dasarnya, kelompok tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan dan kebersamaan menghadapi kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, keakraban dan keserasian) yang dipimpin oleh seorang ketua. Kelompok tani ini akan membentuk komunitas petani dalam rangka mempermudah pengadaan sarana produksi pertanian, seperti bibit, pupuk maupun obat-obatan. Hal ini akan lebih efektif jika dilakukan oleh kelompok tani daripada secara individu karena biaya pengadaan sarana produksi pertanian dapat ditanggung bersama. Selain itu, mereka secara bersama-sama memiliki kekuatan untuk menentukan harga hasil pertaniannya. Di Desa Ganesha Mukti terdapat 12 kelompok tani, yaitu: (1) Darma Mekar Bakti, (2) Lemah Mukti, (3) Mekar Tani, (4) Gemah Ripah, (5) Bakti Jaya, (6) Hidup Makmur, (7) Madu, (8) Polewali, (9) Sederhana, (10) Jaya Mukti, (11) Harapan, dan (12) Karya Situru.

RDKK Pupuk Bersubsidi merupakan rencana kebutuhan pupuk poktan selama satu tahun, yang selanjutnya dilakukan rekapitulasi secara berjenjang dari tingkat desa sampai tingkat pusat. Hasil rekapitulasi tersebut digunakan sebagai dasar usulan kebutuhan pupuk bersubsidi tingkat nasional tahun berikutnya. RDKK Pupuk Bersubsidi tersebut sekaligus juga digunakan sebagai alat pesanan pupuk bersubsidi kepada penyalur/pengecer resmi pupuk bersubsidi. Fasilitas pupuk bersubsidi diberikan kepada petani dengan luas lahan maksimal seluas dua hektar dan satu hektar bagi petambak serta hanya akan diberikan kepada setiap petani yang bergabung dalam poktan. Pengurus poktan diharapkan dapat memotivasi petani lainnya untuk bergabung dalam poktan serta bersama-sama menyusun RDKK Pupuk Bersubsidi (Irianto, 2014).

Tidak lancarnya distribusi pupuk pada petani tentunya akan sangat mengganggu keberlangsungan proses produksi yang berimbas pada tidak tercapainya peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis. Asumsi

yang berkembang mengatakan bahwa, hal ini disebabkan oleh penyusunan RDK/RDKK yang tidak melibatkan petani melainkan hanya dibuat oleh sekretaris GAPOKTAN, penyuluh pertanian atau unsur Dinas Pertanian setempat. Hal ini dikarenakan petani tidak mempunyai suara dalam penyusunan RDKK. Jarak pengajuan dengan turunnya RDKK adalah 1 minggu, atau tergantung kebutuhan. PUSRI melayani setiap hari karena di Muara Sugihan terutama di desa Ganesha Mukti tidak tergantung masa tanam.

Untuk realisasi RDKK dari GAPOKTAN ke petani yaitu melalui pertemuan antara ketua GAPOKTAN dengan kelompok tani di tempat pengecer untuk sosialisasi. Pengumpulan data dilakukan sesuai kebutuhan, dibagikan atau disalurkan langsung ke kelompok tani sesuai data awal, dan diberikan tanda terima. Jumlah permintaan sesuai dengan realisasi RDKK.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyuluh pertanian di desa Ganesha Mukti, terdapat beberapa masalah dalam penyusunan RDKK, diantaranya; (1) nama tidak sesuai dengan KTP; (2) nama pemilik lahan dan sertifikat bukan nama penggarap lahan; (3) sawah petani terletak di desa Ganesha Mukti namun rumah berdasarkan alamat di KTP yang menggarap berasal dari desa lain (Indra pura); (4) terdapat nama ganda.

Topik ini penting untuk diteliti, karena permasalahan tahunan dalam pertanian adalah masalah pupuk. Masalah pupuk ini terjadi ketika para petani memasuki masa tanam pasca masa panen, yaitu dengan maraknya kelangkaan pupuk yang terjadi di sejumlah daerah dan celah dalam melakukan pencurian pupuk bersubsidi ini banyak dilakukan di proses perumusan RDKK.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui penyusunan dan pelaksanaan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi pada kelompok tani di desa Ganesha Mukti dengan judul **”Studi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Di Desa Ganesha Mukti (Studi Kasus Desa Ganesha Mukti Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang perlu diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana kegiatan pelaksanaan penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi di desa Ganesha Mukti?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi di desa Ganesha Mukti?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mempelajari kegiatan pelaksanaan penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi di desa Ganesha Mukti.
2. Untuk mempelajari kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi di desa Ganesha Mukti.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan akademik bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pertanian.
2. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan bagian dari proses belajar yang harus ditempuh sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bagi pemerintah dan instansi terkait, dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan pembangunan secara keseluruhan.

4. Bagi peneliti lain, sebagai landasan dan bahan informasi untuk penelitian sejenis, serta dapat pula sebagai titik tolak untuk melaksanakan penelitian serupa dalam lingkup yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anis, Suwiton M., Effendy, Lukman., & Muslihat, Elih Juhdi. 2014. Partisipasi Anggota Kelompok Tani dalam Penyusunan Rencana Definitif Kelompok/Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok. *Skripsi*. Tidak dipublikasikan.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Ed Revisi VI, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Berlian, Mery. 2014. Peran Penyuluh Pertanian Lapangan dan Partisipasi Petani dalam Program FEATI serta pengaruhnya terhadap Pendapatan Petani di Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin. *Jurnal Matematika, Saint, dan Teknologi, Volume 15, Nomor 1, Maret 2014, 52-62* . Agribisnis FMIPA UPBJJ-UT Palembang.
- Hasibuan. 2012. Peranan Kelompok Tani Terhadap Keberhasilan Penyaluran Pupuk Bersubsidi (Studi Kasus: Desa Serba Jadi, Kecamatan Sunggal, Kab. Deli Serdang). *Jurnal Ilmiah*. Program Studi Agribisnis di Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Irianto, Sumarjo Gatot. 2014. *Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi*. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan Kementrian Pertanian.
- . 2016. *Pedoman Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2016*. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan Kementrian Pertanian.
- Ningsih, Rahayu. 2017. Menuju Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi Yang Lebih Efektif dan Efisien. *Artikel*. Pusdiklat Perdagangan. <http://www.kemendag.go.id/pusdiklat/news/wawasan/14> Diakses tanggal 28 April 2017.
- Peraturan Menteri Pertanian No. 273 Tahun 2007 tentang Penyusunan Rencana Definitif Kelompok/Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDK/RDKK)S
- Peraturan Menteri Perdagangan No.07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pupuk Bersubsidi
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.310/12/2016 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2017.

Permana, Pending Dadih. 2017. *Petunjuk pelaksanaan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi TA 2018*. Direktorat sarana dan prasarana pertanian Kementerian pertanian.

Siregar, Abi. 2015. Pupuk bersubsidi. *Article Resarch Gate*. Gadjah Mada University.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

----- . 2016. *Metode penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta*.

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017